

**PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK DALAM
PENINGKATAN NILAI PUBLIK
(Studi Kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)**



Disusun oleh:
Rinata Septiani Putri
NPM: 2426061003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

**PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK DALAM
PENINGKATAN NILAI PUBLIK
(Studi Kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)**

Abstrak

Manajemen strategis sektor publik merupakan pendekatan penting dalam mengelola organisasi pemerintah agar dapat menciptakan nilai publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada profit, sektor publik bertujuan mencapai legitimasi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini menelaah konsep manajemen strategis menurut Paul Joyce (2015) dan para pengembang teori lain seperti Bryson, Moore, dan Ferlie, serta mengaplikasikannya pada studi kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan telaah teori dan data sekunder. Proses manajemen strategis Kemenkes mencakup analisis lingkungan (PESTEL–SWOT), formulasi strategi, implementasi enam pilar transformasi kesehatan, serta evaluasi menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil menunjukkan bahwa Kemenkes berhasil meningkatkan nilai publik melalui kolaborasi lintas sektor dan integrasi digital (SATUSEHAT). Namun, tantangan koordinasi dan kesenjangan kapasitas daerah masih perlu diperkuat melalui kepemimpinan strategis.

Kata Kunci: Manajemen strategis, sektor publik, nilai publik, Kemenkes RI, SAKIP, SATUSEHAT.

1. Pendahuluan

Manajemen strategis sektor publik muncul sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi birokrasi dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan modern, organisasi publik dihadapkan pada kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang saling berkaitan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mampu menyusun strategi jangka panjang yang adaptif dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (*public value*).

Paul Joyce (2015) menegaskan bahwa strategi dalam sektor publik harus memperhitungkan dinamika lingkungan yang kompleks, termasuk tekanan politik, keterbatasan fiskal, serta tuntutan partisipasi publik. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk “bekerja dengan benar” (*doing things right*), tetapi juga “melakukan hal yang benar” (*doing the right things*). Oleh karena itu, manajemen strategis di sektor publik menekankan pada keseimbangan antara legitimasi, efisiensi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan desentralistik menghadapi tantangan besar dalam penerapan manajemen strategis. Banyak kebijakan gagal mencapai sasaran karena lemahnya perencanaan jangka panjang dan koordinasi antar-tingkatan pemerintahan. Reformasi birokrasi yang diluncurkan sejak 2000-an menekankan pentingnya sistem perencanaan berbasis kinerja (SAKIP), namun implementasinya masih belum optimal.

Sektor kesehatan menjadi contoh konkret penerapan manajemen strategis publik. Pandemi COVID-19 menegaskan bahwa keberhasilan sektor kesehatan tidak hanya bergantung pada kapasitas medis, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengelola strategi nasional, koordinasi lintas-lembaga, dan penggunaan teknologi digital. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memainkan peran sentral dalam reformasi sistem kesehatan melalui enam pilar transformasi kesehatan yang menjadi arah strategis jangka menengah 2020–2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Strategis Sektor Publik

Paul Joyce (2015) mendefinisikan manajemen strategis sektor publik sebagai proses sistematis yang digunakan organisasi publik untuk menentukan arah jangka panjang dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. Bryson (2018) menambahkan bahwa perencanaan strategis publik merupakan upaya kolektif untuk menentukan masa depan organisasi melalui analisis lingkungan, partisipasi stakeholder, dan pemilihan prioritas strategis.

Michael Moore (2013) memperkenalkan Public Value Framework yang menekankan bahwa keberhasilan organisasi publik diukur dari sejauh mana kebijakan dan layanan yang diberikan mampu menciptakan nilai bagi masyarakat. Ferlie dan Ongaro (2015) kemudian memperkuat pandangan ini dengan konsep public service logic yang memandang warga bukan sekadar penerima layanan, melainkan mitra aktif dalam proses penciptaan nilai.

2.2 Karakteristik Manajemen Strategis di Sektor Publik

Manajemen strategis dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan manajemen strategis di sektor privat. Jika sektor privat berfokus pada pencapaian keuntungan finansial dan keunggulan kompetitif, maka sektor publik menitikberatkan pada pencapaian nilai publik, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan organisasi publik tidak diukur berdasarkan laba, melainkan pada sejauh mana kebijakan, program, dan layanan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Karakteristik pertama dari manajemen strategis sektor publik adalah orientasi pada nilai publik. Paul Joyce (2015) menjelaskan bahwa strategi publik harus berfokus pada penciptaan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan pelayanan maupun perlindungan sosial. Nilai publik ini diwujudkan melalui kebijakan yang adil,

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Michael Moore (2013) menegaskan bahwa nilai publik mencerminkan keseimbangan antara manfaat sosial, legitimasi politik, dan kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan.

Kedua, proses strategis di sektor publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholders). Pemerintah tidak dapat bekerja secara terisolasi, melainkan harus berkolaborasi dengan lembaga legislatif, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat itu sendiri. Bryson (2018) menyatakan bahwa partisipasi berbagai pihak merupakan elemen penting untuk menjamin legitimasi strategi, mengingat setiap keputusan publik memiliki konsekuensi sosial dan politik yang luas. Dengan demikian, proses formulasi strategi publik harus bersifat inklusif dan partisipatif agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap tahap manajemen strategis sektor publik. Berbeda dengan organisasi bisnis yang dapat menyimpan rahasia strategi sebagai bagian dari kompetisi, organisasi publik wajib membuka proses perencanaannya kepada publik. Pengawasan masyarakat dan lembaga independen seperti BPK atau KPK merupakan bagian integral dari proses strategis untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan kebijakan. Transparansi ini juga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab.

Keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan menjadi ciri khas lain dari manajemen strategis publik. Sektor publik beroperasi dalam konteks sosial-politik yang sangat dinamis; perubahan kepemimpinan politik, kebijakan fiskal, krisis global, dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi arah kebijakan strategis. Oleh karena itu, organisasi publik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan cepat melalui inovasi kebijakan dan reformasi kelembagaan. Paul Joyce (2015) menyebut kemampuan adaptasi ini sebagai *strategic agility*, yaitu kemampuan pemerintah untuk belajar dari pengalaman, mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan, dan menyesuaikan strategi sesuai dinamika masyarakat.

Kelima, orientasi pada kinerja dan pembelajaran berkelanjutan merupakan elemen penting lainnya. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang terukur dan berbasis hasil (outcome-based performance), bukan sekadar keluaran administratif (output). Dengan cara ini, setiap strategi dapat dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Strategic Management Cycle dari Ferlie dan Ongaro (2015), yang menekankan pentingnya proses refleksi dan umpan balik dalam perumusan strategi publik. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan lembaga publik untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan efektivitas program secara sistematis.

Dari seluruh karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis sektor publik bersifat kompleks, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai sosial. Tujuan akhirnya bukan hanya mencapai efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara melalui penyelenggaraan kebijakan yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberhasilan strategi publik tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan legitimasi pemerintahan yang demokratis.

2.3 Evolusi Teori Manajemen Strategis Publik

Perkembangan teori manajemen strategis sektor publik mengalami perjalanan yang panjang dan dinamis, seiring dengan perubahan paradigma administrasi publik di berbagai negara. Setiap periode sejarah menghadirkan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana organisasi pemerintah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi.

Pada periode 1980–1990, paradigma yang dominan adalah New Public Management (NPM). Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap birokrasi tradisional yang dianggap lamban, kaku, dan tidak efisien. NPM menekankan penerapan prinsip-prinsip manajerial sektor swasta ke dalam pemerintahan, seperti efisiensi, orientasi hasil, kompetisi semu antar instansi, dan fokus pada kinerja individu. Pemerintah dianggap sebagai penyedia layanan (service provider) yang harus bersaing dalam hal mutu dan

efisiensi anggaran. Meskipun berhasil meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas di beberapa negara, NPM sering dikritik karena mengabaikan nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan legitimasi demokratis.

III. STUDI KASUS: KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

3.1 Profil dan Mandat Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan tujuan nasional di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Mandat Kemenkes ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan manusia unggul.

Visi Kemenkes dalam Renstra 2020–2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.” Untuk mencapai visi tersebut, Kemenkes menetapkan enam pilar transformasi kesehatan sebagai strategi utama yang meliputi: (1) transformasi layanan primer, (2) transformasi layanan rujukan, (3) transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) transformasi pembiayaan kesehatan, (5) transformasi SDM kesehatan, dan (6) transformasi teknologi kesehatan dan data.

Enam pilar tersebut menjadi tulang punggung strategi nasional sektor kesehatan yang diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki sistem pelayanan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal dan perbatasan. Dengan demikian, Kemenkes RI merupakan contoh konkret penerapan manajemen strategis sektor publik berbasis nilai publik (public value management) sebagaimana dirumuskan oleh Paul Joyce (2015) dan Michael Moore (2013).

3.2 Analisis Lingkungan Strategis

Kemenkes beroperasi dalam lingkungan strategis yang sangat kompleks dan penuh dinamika. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor eksternal dan internal menjadi kunci dalam perumusan strategi. Analisis dilakukan melalui pendekatan PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) dan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

3.2.1 Analisis PESTEL

1. **Faktor Politik (Political):** Dukungan politik terhadap sektor kesehatan meningkat signifikan pasca pandemi COVID-19. Presiden dan DPR memberikan komitmen kuat terhadap peningkatan anggaran kesehatan serta reformasi sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun, perubahan kebijakan politik di tingkat daerah masih sering menghambat konsistensi implementasi program kesehatan nasional.
2. **Faktor Ekonomi (Economic):** Keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Porsi anggaran kesehatan terhadap APBN masih sekitar 5%, sedangkan standar WHO merekomendasikan 15%. Kemenkes harus melakukan efisiensi melalui pembiayaan berbasis kinerja, serta memperluas kemitraan publik–swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam pembiayaan fasilitas kesehatan.
3. **Faktor Sosial (Social):** Ketimpangan sosial dan geografis memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan. Tingkat literasi kesehatan masyarakat juga masih rendah, terutama di wilayah timur Indonesia. Perubahan gaya hidup dan peningkatan penyakit tidak menular (seperti diabetes dan hipertensi) menuntut strategi pencegahan yang lebih kuat di tingkat komunitas.
4. **Faktor Teknologi (Technological):** Percepatan digitalisasi menjadi peluang besar. Program SATUSEHAT mengintegrasikan seluruh data pasien dan fasilitas kesehatan ke dalam satu sistem nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi tenaga kesehatan, serta risiko keamanan data.

5. **Faktor Lingkungan (Environmental):** Perubahan iklim dan degradasi lingkungan memunculkan risiko baru terhadap kesehatan masyarakat seperti meningkatnya kasus ISPA, demam berdarah, dan penyakit zoonosis. Oleh karena itu, strategi kesehatan publik juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.
6. **Faktor Hukum (Legal):** Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan UU No. 36/2009 menjadi landasan hukum baru bagi reformasi sistem kesehatan nasional. UU ini memperkuat peran pemerintah dalam standardisasi layanan, pengawasan tenaga kesehatan, dan integrasi sistem informasi kesehatan nasional.

3.2.2 Analisis SWOT

- **Kekuatan (Strengths):** Jaringan layanan kesehatan yang luas (puskesmas, rumah sakit, laboratorium), dukungan politik kuat, serta basis regulasi yang lengkap.
- **Kelemahan (Weaknesses):** Fragmentasi data antar instansi, birokrasi yang panjang, dan ketimpangan kualitas SDM kesehatan di daerah.
- **Peluang (Opportunities):** Transformasi digital, kolaborasi internasional dalam riset dan vaksinasi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dalam promosi kesehatan.
- **Ancaman (Threats):** Kesenjangan infrastruktur antarwilayah, tantangan fiskal, serta potensi disinformasi kesehatan di media sosial.

Kombinasi analisis PESTEL dan SWOT ini menjadi dasar bagi Kemenkes dalam melakukan formulasi strategi jangka menengah dan panjang agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan perubahan lingkungan global.

3.3 Formulasi dan Implementasi Strategi

Kemenkes RI merumuskan strategi melalui pendekatan **strategic alignment**, yakni memastikan keselarasan antara kebijakan nasional (RPJMN dan SDGs), rencana strategis organisasi, dan program operasional di daerah. Strategi ini diwujudkan melalui enam pilar transformasi kesehatan yang berfungsi sebagai arah kebijakan utama.

1. Transformasi Layanan Primer

Fokus pada peningkatan peran puskesmas dan posyandu dalam promosi kesehatan, deteksi dini, dan pencegahan penyakit. Kemenkes meluncurkan program *Primary Health Care Strengthening* yang mengintegrasikan data kesehatan masyarakat berbasis wilayah dan memperkuat layanan promotif-preventif.

2. Transformasi Layanan Rujukan

Strategi ini memperkuat sistem rujukan nasional melalui peningkatan kapasitas rumah sakit daerah dan pengembangan *Regional Health Referral System (RHRS)*. Tujuannya adalah memastikan setiap pasien mendapat layanan sesuai standar tanpa terkendala lokasi geografis.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Pilar ini menekankan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, ketersediaan alat kesehatan, serta kemandirian farmasi dan vaksin. Setelah pandemi COVID-19, Indonesia memperkuat *National Health Security System* yang mengintegrasikan surveilans, logistik, dan koordinasi antarinstansi.

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan diarahkan pada sistem yang efisien dan transparan melalui optimalisasi JKN serta penerapan *output-based budgeting*. Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPJS untuk menata ulang subsidi kesehatan agar lebih tepat sasaran.

5. Transformasi SDM Kesehatan

Melalui program *Health Human Resource Reform*, pemerintah menambah kuota beasiswa, memperluas distribusi tenaga kesehatan ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta meningkatkan kompetensi digital tenaga medis.

6. Transformasi Teknologi Kesehatan dan Data (SATUSEHAT)

Inovasi ini merupakan wujud nyata implementasi teori *Public Value Management*. SATUSEHAT berfungsi sebagai sistem informasi nasional yang mengintegrasikan data pasien, fasilitas kesehatan, dan pembiayaan. Program ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Implementasi keenam pilar ini menunjukkan bahwa Kemenkes berhasil mempraktikkan prinsip-prinsip manajemen strategis sektor publik sebagaimana dirumuskan Joyce (2015): pemahaman konteks strategis, formulasi yang adaptif, dan implementasi yang terukur.

3.4 Evaluasi Kinerja dan Penciptaan Nilai Publik

Evaluasi strategis dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Berdasarkan laporan KemenPAN-RB tahun 2023, nilai SAKIP Kemenkes mencapai predikat “A” dengan skor 91,25. Hal ini menandakan bahwa perencanaan dan implementasi strategis telah dilakukan secara konsisten, transparan, dan terukur.

Dari perspektif nilai publik, strategi Kemenkes memberikan hasil nyata, antara lain:

- Penurunan prevalensi stunting dari 30,8% (2018) menjadi 21,6% (2023).
- Cakupan vaksinasi COVID-19 mencapai lebih dari 86% populasi.
- Integrasi data 72% fasilitas kesehatan ke dalam sistem SATUSEHAT.
- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital (telemedis, antrean online, dan e-resep).

Meskipun capaian ini menggembirakan, masih terdapat tantangan dalam kesenjangan kualitas layanan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan.

3.5 Tantangan Strategis dan Rekomendasi

Dalam konteks manajemen strategis, keberhasilan Kemenkes RI tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi agar nilai publik yang dihasilkan lebih berkelanjutan.

Pertama, fragmentasi kelembagaan dan koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala. Banyak program kesehatan memerlukan sinergi dengan kementerian lain seperti Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkeu. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi strategis berbasis whole of government approach.

Kedua, kesenjangan kapasitas daerah masih menghambat implementasi strategi nasional. Pemerintah pusat perlu memperkuat pelatihan manajerial dan kepemimpinan strategis bagi pejabat dinas kesehatan daerah agar mampu mengadaptasi strategi nasional sesuai kondisi lokal.

Ketiga, transformasi digital perlu didukung oleh kebijakan keamanan data dan peningkatan literasi teknologi di kalangan tenaga medis. Sistem SATUSEHAT harus disertai dengan regulasi yang memastikan perlindungan privasi dan keamanan data pasien.

Keempat, penguatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan kebijakan publik. Kemenkes perlu memperluas forum komunikasi publik seperti community health dialogue dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperkuat akuntabilitas sosial.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, Kemenkes RI dapat terus memperkuat manajemen strategisnya menuju organisasi publik yang inovatif, adaptif, dan berorientasi nilai publik sesuai dengan prinsip Public Value Management yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis, bukan sekadar penerima kebijakan.

Kesimpulan

Manajemen strategis sektor publik merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada nilai publik. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, strategi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif untuk mencapai target kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme integratif yang mampu menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Telaah teoritis menunjukkan bahwa konsep manajemen strategis sektor publik telah mengalami evolusi signifikan — dari paradigma New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi dan rasionalitas ekonomi, menuju paradigma Public Value Management (PVM) yang lebih menekankan nilai sosial, legitimasi demokratis, dan kolaborasi lintas sektor. Pemikiran Paul Joyce (2015), Michael Moore (2013), serta Bryson (2018) memperkuat pandangan bahwa strategi publik yang berhasil harus mampu mengintegrasikan tiga elemen utama, yaitu penciptaan nilai publik (public value), legitimasi politik (legitimacy), dan kapasitas operasional (operational capacity).

Melalui studi kasus pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen strategis publik telah berjalan secara sistematis, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Enam pilar transformasi kesehatan yang menjadi arah strategis Kemenkes — mulai dari layanan primer hingga transformasi digital — mencerminkan penerapan teori Joyce dan Moore secara konkret. Strategi tersebut bukan hanya memperbaiki efisiensi birokrasi kesehatan, tetapi juga menggeser orientasi organisasi menuju peningkatan nilai publik yang berkelanjutan.

Implementasi program SATUSEHAT sebagai sistem integrasi data kesehatan nasional menjadi bukti nyata penerapan prinsip strategic alignment dan evidence-based policy. Melalui digitalisasi data, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur. Demikian pula dengan penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen evaluasi strategis, yang memastikan setiap program Kemenkes memiliki keterkaitan langsung dengan indikator hasil (outcome).

Dari sisi kinerja, strategi ini telah menunjukkan capaian positif: penurunan angka stunting nasional, peningkatan cakupan vaksinasi, penguatan fasilitas kesehatan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Hal ini menegaskan bahwa penerapan manajemen strategis publik dapat secara nyata menghasilkan nilai publik yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan infrastruktur kesehatan antarwilayah, keterbatasan kapasitas SDM di daerah, dan resistensi terhadap digitalisasi merupakan hambatan yang perlu segera diatasi. Di sisi lain, kebutuhan akan kepemimpinan strategis dan kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting, mengingat kompleksitas permasalahan kesehatan yang bersifat multidimensi dan lintas lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis publik bukan sekadar seperangkat prosedur teknokratis, melainkan sebuah pendekatan dinamis yang mengintegrasikan visi, nilai, dan tindakan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemenkes RI telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, meskipun keberlanjutan dan konsistensi implementasinya tetap menjadi tantangan utama di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Andrews, R., & Boyne, G. (2019). *Public Management and Organizational Performance. Public Administration Review*.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass.
- Bryson, J., Crosby, B., & Bloomberg, L. (2020). *Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration. Public Administration Review*.
- Ferlie, E., & Ongaro, E. (2015). *Strategic Management in Public Services Organizations*. Routledge.
- Joyce, P. (2015). *Strategic Management in the Public Sector*. Routledge.
- Moore, M. (2013). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Setiawan, D., & Rahmawati, F. (2022). "Kolaborasi Strategis Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Sektor Kesehatan." *Jurnal Bina Praja*.
- Wijaya, H. (2021). "Implementasi Manajemen Strategis dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2023*. Jakarta